Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Volume: 1, Nomor: 5, (2025), Oktober: 724 - 733
Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/jggmultidisciplinary/article/view/511
E-ISSN: 3123-6278; DOI: https://doi.org/10.65244/jggm.v1i5.511

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Desa untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif: Studi pada Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Ahmad Hoerudin [1], Rusliandy [2], Agus Suarman Sudarsa [3]
Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: ahmadhoerudin69@gmail.com [1], rusliandy1980@gmail.com [2], agussuarman08@gmail.com [3]*

Info Artikel
Submitted: *10 Juli 2025*
Revised: *25 Agustus 2025*
Accepted: *09 September 2025*
Published: *30 Oktober 2025*

Keywords: *Village asset management; policy implementation; village land; creative economy; local governance*

Abstract
This study examines the implementation of village inventory land management policy in supporting creative economy development in Palasari Village, Cijeruk District, Bogor Regency. Despite the existence of strategic village land assets, their utilization has not been optimized to generate sustainable economic value for the community. This study aims to analyze policy implementation, identify constraints, and explore development strategies. A qualitative descriptive approach was employed through in-depth interviews, observation, and document analysis involving village officials, community leaders, and creative economy actors. The analysis was guided by Edward III's policy implementation model, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that policy implementation has not been fully effective due to limited communication, inadequate human resource capacity, absence of standardized operating procedures, and weak institutional coordination. Land utilization remains conventional and has not yet supported structured creative economy activities. However, the village possesses significant potential to develop creative economic zones such as UMKM centers, creative spaces, and agro-tourism areas. The study concludes that strengthening institutional capacity, establishing clear regulatory frameworks, and developing strategic planning are essential to optimize village land as a sustainable driver of local economic development and village original income.

Kata Kunci*: Pengelolaan aset desa; implementasi kebijakan; tanah inventaris desa; ekonomi kreatif; pemerintahan desa*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Meskipun desa memiliki aset tanah strategis, pemanfaatannya belum optimal dalam menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi kreatif. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif akibat keterbatasan komunikasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum adanya standar operasional prosedur, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Pemanfaatan tanah desa masih bersifat konvensional dan belum mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara sistematis. Namun demikian, terdapat potensi besar untuk mengembangkan sentra UMKM, ruang kreatif, dan kawasan wisata berbasis aset desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi yang jelas, dan

perencanaan strategis diperlukan untuk mengoptimalkan tanah desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.

***This work is licensed under a** Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Ekonomi kreatif tidak hanya berfokus pada produksi barang dan jasa, tetapi juga menekankan pada pemanfaatan kreativitas, inovasi, dan potensi lokal sebagai sumber nilai ekonomi baru. Dalam konteks pembangunan desa, ekonomi kreatif dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli desa. Salah satu sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif adalah aset desa, khususnya tanah inventaris desa, yang secara hukum merupakan kekayaan desa dan harus dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka regulasi pengelolaan aset desa melalui berbagai kebijakan, salah satunya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai pembaruan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut menegaskan bahwa aset desa, termasuk tanah inventaris desa, harus dikelola secara tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa sebagai aktor utama memiliki kewenangan untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengawasi penggunaan aset desa dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, pengelolaan tanah inventaris desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana dan masyarakat. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran,

maupun sarana prasarana, menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan komitmen dan kesiapan aparatur dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi yang jelas dan terstandarisasi memastikan adanya koordinasi dan mekanisme kerja yang efektif. Dalam konteks pengelolaan aset desa, keempat faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan tanah inventaris desa sebagai aset produktif yang mampu mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan tanah desa masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun kapasitas sumber daya manusia. Penelitian Supriatna (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas desa belum optimal akibat lemahnya koordinasi kelembagaan dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Penelitian Sipiyani (2023) juga menemukan bahwa pemanfaatan tanah desa belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat akibat lemahnya perencanaan dan pengelolaan aset. Sementara itu, penelitian Sinaga dan Rini (2023) menunjukkan adanya hambatan struktural dan keterbatasan kewenangan desa dalam mengelola aset secara mandiri. Penelitian lainnya menyoroti bahwa pemanfaatan aset desa berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila dikelola secara inovatif dan partisipatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai strategi pembangunan ekonomi lokal berbasis aset desa.

Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi aset tanah inventaris desa yang cukup besar dan strategis untuk dikembangkan sebagai basis ekonomi kreatif. Desa ini memiliki lahan inventaris desa yang sebelumnya tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tanah desa selama ini masih didominasi oleh kegiatan konvensional seperti penyewaan lahan pertanian dan kegiatan sosial, yang belum mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara optimal. Selain itu, pemanfaatan tanah inventaris desa belum didukung oleh perencanaan strategis, standar operasional prosedur yang jelas, maupun sistem pengelolaan aset yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi aset desa yang tersedia dan tingkat pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif.

Di sisi lain, Desa Palasari memiliki potensi sosial dan ekonomi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, termasuk keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), potensi wisata lokal, serta sumber daya manusia usia produktif yang cukup besar. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pemanfaatan tanah inventaris desa sebagai ruang produksi, pemasaran, dan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif berbasis aset desa secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kebijakan pengelolaan aset desa yang telah ditetapkan secara normatif dengan implementasinya di tingkat desa, khususnya dalam pemanfaatan tanah inventaris desa untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan publik menggunakan model Edward III dengan pendekatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis aset desa, yang secara khusus dikaji dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa, tetapi juga mengkaji potensi pemanfaatannya sebagai instrumen pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, serta mengidentifikasi kendala dan potensi pengembangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan desa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset desa sebagai sumber pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena kebijakan secara komprehensif berdasarkan perspektif pelaksana dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk,

Kabupaten Bogor, yang dipilih secara purposive karena memiliki aset tanah inventaris desa yang berpotensi dikembangkan sebagai basis ekonomi kreatif.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa. Informan utama meliputi Kepala Desa Palasari, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparatur desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, serta perwakilan pemerintah kecamatan dan instansi terkait. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis aset desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan kebijakan, peran aparatur desa, serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah inventaris desa. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi fisik tanah inventaris desa dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi seperti peraturan desa, data aset desa, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi temuan lapangan dan menghubungkannya dengan teori implementasi kebijakan, khususnya model Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, member check, serta peer debriefing. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan metode pengumpulan data, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan objektif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Palasari.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kondisi dan Potensi Tanah Inventaris Desa

Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, memiliki aset tanah inventaris desa yang tersebar dalam beberapa kategori, seperti tanah kas desa produktif, lahan fasilitas umum, dan lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal. Secara geografis, desa ini berada di wilayah dengan potensi ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan usaha mikro masyarakat. Keberadaan lahan inventaris desa menjadi aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah inventaris desa masih didominasi oleh penggunaan konvensional, seperti penyewaan lahan untuk kegiatan pertanian dan penggunaan lapangan desa untuk kegiatan sosial. Pemanfaatan tersebut belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Selain itu, belum tersedia perencanaan strategis yang mengintegrasikan pengelolaan tanah inventaris desa dengan program pengembangan ekonomi kreatif.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model Edward III

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan tingkat pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa telah dilakukan melalui forum musyawarah desa dan komunikasi informal antara aparatur desa dan masyarakat. Namun, proses sosialisasi tersebut belum berjalan secara optimal dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif.

Minimnya penyampaian informasi yang sistematis menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami prosedur dan peluang pemanfaatan tanah inventaris desa. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah kecamatan dan lembaga desa, masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi desa.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Dari aspek sumber daya manusia, aparatur desa memiliki komitmen untuk mengelola tanah inventaris desa, namun masih menghadapi keterbatasan kompetensi teknis dalam

manajemen aset dan pengembangan ekonomi kreatif. Tidak adanya unit khusus yang menangani pengembangan ekonomi kreatif menyebabkan program pemanfaatan aset desa belum berjalan secara optimal.

Dari aspek sumber daya finansial, pendanaan pengelolaan aset desa masih terbatas dan lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan pelayanan dasar. Alokasi anggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis tanah desa belum menjadi prioritas utama. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang usaha, sentra UMKM, dan fasilitas kreatif, menjadi hambatan dalam mengembangkan tanah inventaris desa sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif.

Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan tingkat komitmen dan kesiapan aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen yang cukup baik dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah inventaris desa. Kepala desa dan aparatur desa menunjukkan sikap positif dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis aset desa.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala akibat belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Ketiadaan SOP menyebabkan perbedaan interpretasi dalam proses pengelolaan aset desa dan mengakibatkan ketidakpastian dalam prosedur pemanfaatan tanah desa oleh masyarakat. Kondisi ini berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan terstandarisasi merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah inventaris desa telah mengacu pada regulasi nasional, namun belum didukung oleh sistem administrasi yang terintegrasi di tingkat desa. Belum tersedianya database aset desa yang lengkap dan rencana induk pemanfaatan tanah desa menyebabkan pengelolaan aset belum berjalan secara sistematis.

Selain itu, koordinasi antar lembaga desa dan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal, sehingga perencanaan pemanfaatan tanah desa belum terintegrasi dengan program pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi pengelolaan aset desa masih memerlukan penguatan kelembagaan dan sistem administrasi yang lebih profesional.

Pemanfaatan Tanah Desa untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Meskipun implementasi kebijakan belum optimal, tanah inventaris desa memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan

desa dapat dikembangkan menjadi sentra UMKM, kawasan wisata edukasi, pasar kreatif, dan ruang kreatif bagi masyarakat. Pengembangan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun, berbagai hambatan masih menghambat pengembangan tersebut, seperti keterbatasan perencanaan strategis, rendahnya kapasitas kelembagaan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Selain itu, belum adanya integrasi antara kebijakan pengelolaan aset desa dan strategi pengembangan ekonomi kreatif menyebabkan potensi aset desa belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa di Desa Palasari belum berjalan secara optimal jika dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Dari aspek komunikasi, kurangnya sosialisasi dan koordinasi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan distorsi implementasi kebijakan.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan kapasitas aparatur desa dan minimnya sarana pendukung menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari aspek disposisi, meskipun aparatur desa memiliki komitmen yang baik, ketiadaan standar operasional prosedur dan sistem administrasi yang jelas menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana harus didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Dari aspek struktur birokrasi, belum adanya sistem pengelolaan aset desa yang terintegrasi menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan tata kelola aset desa. Struktur birokrasi yang tidak terstandarisasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan dan mengurangi akuntabilitas pengelolaan aset publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tanah inventaris desa memiliki potensi besar sebagai instrumen pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat kelemahan implementasi kebijakan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis, penguatan kapasitas aparatur desa,

serta penyusunan regulasi internal yang jelas untuk mendukung pemanfaatan tanah desa secara produktif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, belum berjalan secara optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, kendala utama terdapat pada aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, belum tersedianya standar operasional prosedur, serta struktur birokrasi pengelolaan aset yang belum terintegrasi secara sistematis. Meskipun demikian, pemerintah desa menunjukkan komitmen positif dalam mengelola aset desa, dan tanah inventaris desa memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra ekonomi kreatif, seperti pusat UMKM, kawasan wisata edukasi, dan ruang kreatif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi internal yang jelas, serta perencanaan strategis berbasis aset desa menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah inventaris desa sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA (12pt)

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, W. C. (2024). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis aset desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), 45–58.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Setyawati, R. R., & Oktafia, R. (2024). Pengelolaan tanah desa berbasis ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Desa*, 6(1), 21–34.

Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2023). Kebijakan pemanfaatan tanah kas desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55–68.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriatna, A. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 101–115.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.